



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS SARWONO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **21351**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.285.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 3782 m2/200 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 945.000.000
2. Tanah Seluas 3392 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
3. Tanah Seluas 3802 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.140.600.000
4. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 318.000.000

1. MOTOR, HONDA K1H02N14L0 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. MOTOR, HONDA KARISMA/NF125 0 Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, KYMCO SD 25 LM Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.282.800**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 12.500.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 5.646.382.800



III. HUTANG

Rp. 170.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.476.382.800

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.